

PARTAI ISLAM DAN PEMILU 2024

Danis Tri Saputra Wahidin, M. Prakoso Aji, Anwar Ilmar, Mansur Juned
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Email: daniswahidin@gmail.com

INFO ARTIKEL

Research Article

Kata Kunci: Parta Politik Islam,
Pemilu 2024, Peluang dan Strategi
Politik Elektoral

Article History

Dikirim : 28 Oktober 2024
Diterima: 30 November 2024
Dipublikasi: 01 Desember 2024

ABSTRAK

Perkembangan partai politik Islam di Indonesia bergerak secara fluktuatif, namun kemampuan elektabilitasnya selalu berada jauh dari partai nasionalis, persentase suaranya cenderung stagnan dan tetap sulit bersaing dengan partai-partai nasionalis. Kondisi ini didorong oleh berbagai faktor yaitu konflik internal, kasus korupsi, isu radikalisme, lemahnya institusionalisasi partai, kaderisasi yang tidak berkelanjutan, program politik kerakyatan yang bias, peluasan paham Islam moderat, penguatan ormas Islam dan ekspansi elektoral partai-partai nasionalis. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan *mix methode dengan metode sequential exploratory* yang memadukan analisis kualitatif dengan analisis kuantitatif. Penelitian ini menemukan bahwa hampir semua partai politik Islam di Indonesia mampu membaca berbagai peluang, ancaman, kekurangan dan kelebihan dari partai Islam di Indonesia pada pemilu 2024, sehingga sebagian besar strateginya lebih banyak didominasi oleh strategi ofensif, defensif, campuran serta kampanye politik secara bersamaan melalui strategi kampanye sebagai partai politik terbuka, strategi kampanye politik programatik, strategi politik oposisi dan koalisi, perluasan segmentasi pemilih muda dan penguatan kaderisasi internal serta upaya-upaya konstruktif dalam menghadapi politik identitas yang berbasis SARA.

ABSTRACT

The development of Islamic political parties in Indonesia is fluctuating, but their electability is always far from nationalist parties, their percentage of votes tends to stagnate and remains difficult to compete with nationalist parties. This condition is driven by various factors, namely internal conflict, corruption cases, radicalism issues, weak party institutionalization, unsustainable cadre formation, biased popular political programs, expansion of moderate Islamic understanding, strengthening of Islamic mass organizations and electoral expansion of nationalist parties. This study found that almost all Islamic political parties in Indonesia are able to read various opportunities, threats, weaknesses and strengths of Islamic parties in Indonesia in the 2024 elections, so that most of their strategies are dominated by offensive, defensive, mixed strategies and political campaigns simultaneously through campaign strategies as open political parties, programmatic political campaign strategies, opposition and coalition political strategies, expanding the segmentation of young voters and strengthening internal cadres as well as constructive efforts in dealing with SARA-based identity politics.

Pendahuluan

Partai Islam menjadi salah satu kekuatan politik di Indonesia yang berkembang dan memiliki kemampuan bertahan dengan baik dalam setiap perjalanan sejarah demokrasi di Indonesia. Meskipun jumlah pendukungnya tidak bisa dikatakan signifikan dan otoritatif, namun keberadaannya masih penting dalam perjalanan politik di Indonesia, menurut Moch Nurhasim dkk eksistensinya tidak saja menandakan pluralitas dalam penyaluran aspirasi demokrasi di Indonesia, namun lebih jauh dari itu, keindonesiaan tidak memiliki arti tanpa ke-Islaman di dalamnya (Nurhasim 2016). Selain faktor kontrol terhadap moral dan kultur demokrasi Indonesia, Partai Islam juga memiliki peran historis yang penting dalam melawan penjajahan di Indonesia (Romli 2004), Partai Islam sebagai representasi dari kelompok masyarakat muslim di Indonesia memiliki saham besar dalam proses kemerdekaan selain kelompok aliran lainnya seperti kelompok nasionalis dan sosialis-marxisme di Indonesia. Pada konteks yang lain, akselerasi pembangunan politik tidak dapat dilakukan tanpa adanya akomodasi politik pada ketiga komponen tersebut, baik sebagai partai pendukung pemerintah atau partai politik yang beroposisi dan mengkritik pemerintahan.

Relasi negara dan agama di Indonesia bergerak pasang surut secara historis, namun demikian Indonesia tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai religiusitas bahkan hubungannya bersifat simbiosis mutualisme (Darajat 2019). Pasca kemerdekaan, muncul perdebatan sengit antara dua kubu utama dalam sidang PPKI, kedua kubu tersebut berdebat tentang dasar negara, kelompok pertama menginginkan Islam menjadi dasar negara sedangkan kubu yang lainnya menolak ide tersebut hingga munculnya kompromi dengan dimuatnya sila ketuhanan sebagai sila pertama dalam Pancasila sebagai dasar negara (Darajat 2019). Puncak relasi antagonistik antara Islam dan negara terjadi kembali pada momentum tahun 1955-1960, perdebatan sengit tentang dasar negara mengemuka kembali hingga terjadinya pembubaran majelis konstituante dan Partai Masyumi dengan alasan stabilitas politik (Maarif 2017). Pada era orde baru, relasinya bergerak dari depolitisasi, antagonistik hingga akomodatif (Darajat 2019), namun Partai Islam tetap hadir dalam satu partai utama yang berfusi menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), pada awalnya partai ini terdiri dari Nahdhotul ulama, Partai Islam

Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Persatuan Tarbiyah Islam (Perti). Sedangkan pada era reformasi, hubungan tersebut ditandai dengan revivalisme Islam Politik dan menguatnya kembali partai Islam serta gerakan sosial keagamaan yang berkeinginan mendirikan negara syariah (Nubowo 2015). Partai Islam tumbuh bagai jamur di musim hujan, dari 141 partai politik yang tercatat, lebih dari 42 hingga 43 partai politik yang didirikan merupakan Partai Politik Islam, angka ini berkurang hingga 20 partai politik yang lolos mengikuti pemilu 1999. Pasca pemilu 1999, hanya tersisa 7 partai politik yang menjadi aktor partai politik utama. Satu diantaranya adalah PDIP yang merupakan partai sekuler dan nasionalis yang memperoleh suara 34%, dan 6 partai politik lainnya dapat dikatakan sebagai “Partai Politik yang memiliki kedekatan dengan Islam” yaitu PPP, PBB, PKS, PKB, PAN, dan Golkar (Rasyid Baswedan 2004), pada perkembangannya partai politik tersebut memiliki sayap partai keagamaan yang ditujukan secara langsung untuk meraih suara pemilih muslim di Indonesia.

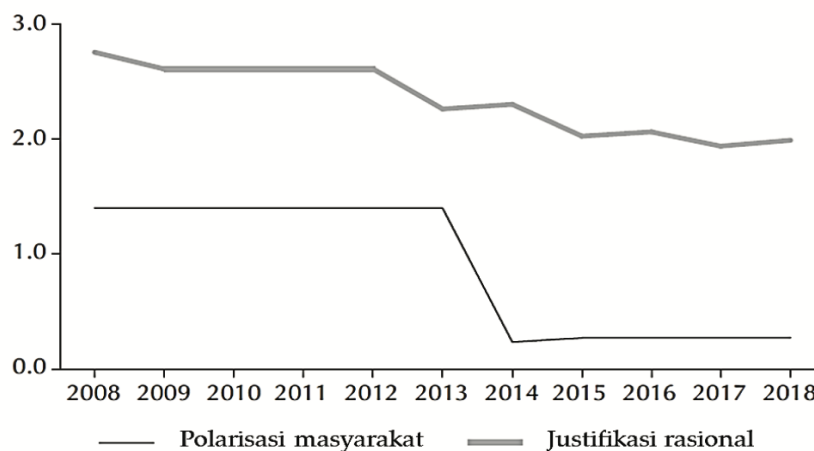
Wacana tentang dasar negara Islam kembali muncul pasca reformasi (Nubowo 2015), diskursus itu bahkan berkembang dalam berbagai dialektika dan perdebatan wacana politik Islam antara lain Islam politik dan Islam kultural, Islam revivalis, Islam fundamentalisme, Islam Modern, Islam Liberal dan Islam Moderat, Azas Islam dan Pancasila serta urgensi “negara Islam” dan “negara Islami” bagi partai Islam dan masyarakat Indonesia. Beberapa Partai Islam menegaskan dirinya sebagai Partai berasaskan Islam-Pancasila dan sebagian partai Islam lainnya tetap menggunakan Islam sebagai asasnya. Perdebatan-perdebatan tersebut menjadi dasar terjadinya kembali dikotomi yang kuat antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis di Indonesia dalam dikotomi wacana kelompok Islam Islam versus nasionalis sekuler di Indonesia (Anjar Nugroho 2013).

Polarisasi kelompok Islam dan nasionalis semakin menemukan titik puncaknya pada tahun 2014 hingga tahun 2019. Kelompok nasionalis sekuler dianggap membuka kembali konflik ideologi lama melalui upaya legalisasi komunisme, pro-China dan syiah. Selain itu, kebijakan-kebijakan pemerintahan dianggap diskriminatif terhadap kelompok Islam terutama kelompok Islam politik yang berposisi terhadap kebijakan pemerintahan di Indonesia. Lemahnya perlindungan terhadap ulama, munculnya anggapan pemerintah yang terlalu membela kelompok minoritas, kebijakan yang represif terhadap umat

Islam, serta berbagai kebijakan lainnya yang dianggap membatasi kegiatan dan ekspresi beberapa kelompok Islam di Indonesia. Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 yang memunculkan isu kekerasan minoritas terhadap mayoritas serta penistaan agama oleh calon *incumbent* memperparah polarisasi politik antara kelompok Islam dan nasionalis dengan munculnya aksi 212 yang menuntut agar kasus penistaan agama diusut dan ditangkap (BBC.com 2017). Ketegangan tersebut tidak hanya didorong oleh beberapa Partai Islam, namun juga FPI, MUI, Muhammadiyah dan Persis serta ormas Islam lainnya. Dampak lainnya adalah munculnya kampanye-kampanye SARA pada pilkada Jakarta seperti larangan untuk tidak memilih pemimpin non-muslim dan menyolatkan pendukung kandidat penista agama.

Penelitian Coppedge dkk (Power, Warburton, and Di 2021) memperlihatkan pola partisipasi masyarakat Indonesia pada tahun 2014 – 2019 yang terpolarisasi dengan skala yang terus meningkat dan menjadikan masyarakat yang tidak mudah terlibat dalam perdebatan politik yang beralasan rasional dan berorientasi pada kekerasan. Data ini dapat terlihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 1. Peningkatan Polarisasi Politik di Indonesia



Catatan: Skor yang lebih rendah menunjukkan polarisasi yang lebih besar atau keinginan yang lebih kecil untuk terlibat dalam debat yang beralasan.

Sumber: Coppedge dkk. (2019).

Perkembangan dinamika polarisasi politik pada pemilu 2014 memiliki korelasi pada peningkatan suara partai Islam secara tidak signifikan yaitu sebesar 5,50% dari pemilu 2009, penguatan elektabilitasnya bergerak dari 25,9% menjadi 31,4%, namun angka ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan perolehan kumulatif tertinggi Partai Islam yang pernah terjadi pada pemilu 1955 dengan jumlah suara 43,9% dan diikuti dengan pemilu tahun 1999 sebesar 37,6% serta pemilu tahun 2004 dengan jumlah suara 38,5%. Perkembangan partai politik Islam di Indonesia pada umumnya mengalami pola politik yang fluktuatif, namun kemampuannya dalam meraih suara selalu berada jauh dari partai nasionalis, berdasarkan pada data pemilu 2004, 2009, 2014, 2019 serta 2024 suara akumulasi partai politik Islam yang sintas (*survive*) berjumlah diantara 38,5% - 26,3%, data ini dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Tabel Perbandingan Perolehan Suara Partai Islam dan Partai Nasionalis di Indonesia

No	Tahun	Jumlah Partai Politik Islam	Persentase suara Partai Islam	Persentase Suara Partai Nasionalis
1	1955	6	43,9	56,1
2	1971	4	27,1	72,9
3	1977	1	29,3	70,7
4	1982	1	27,8	72,2
5	1987	1	16,0	84,0
6	1992	1	17,0	83,0
7	1997	1	22,0	78,0
8	1999	17	37,6	62,4
9	2004	7	38,5	61,5
10	2009	6	25,9	74,1

11	2014	5	31,4	68,6
12	2019	5	30,1	70,0
13	2024	3	26,3	73,7

Sumber : Data dianalisis oleh peneliti dari data-data pemilu yang dihimpun KPU dan dokumen-dokumen pemilu lainnya pada tahun 2024

Kondisi ini memperlihatkan bahwa politisasi SARA tidak berdampak positif dan signifikan pada perkembangan Partai Islam secara nasional dan cenderung bersifat kontraproduktif pada keberlanjutan stabilitas dan pemerataan pembangunan kebangsaan yang heterogen dan dinamis. Pada pemilu 2024 Partai Islam yang sintas mulai mengembangkan strategi-strategi politik yang adaptif, akomodatif, lentur serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kondisi ini didorong oleh pandemi covid 19 dan situasi ekonomi global yang sedang mengalami berbagai masalah yang mengharuskan semua elemen politik dan elemen masyarakat bersatu serta bekerja bersama menanggulangi pandemi covid-19 dan menjaga stabilitas nasional untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, beberapa Partai Islam melihat prototipe kemenangan Partai Islam di Turki yang berhasil bertahan dan memenangkan berbagai pemilu melalui strategi politik moderat. Saat Partai Islam mulai menerapkan pola yang terbuka dan merakyat suaranya meningkat, bahkan suara PKS mendapatkan insentif elektoral yang baik pada pemilu 2024 dengan nuansa politik nasional yang jauh dari isu-isu SARA, dan lebih cenderung menerapkan isu kolaboratif serta politik Kerja. Insentif elektoral pada pemilu 2024 didapatkan PKB, PAN dan PKS yang merupakan Partai politik Islam dengan warna partai politik terbuka dan moderat. Data ini dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. Perbandingan Suara Partai Islam yang lolos *Electoral Threshold* pada pemilu 2024

No	Nama Partai Politik Islam yang Lolos ET 2024	Pemilu 2004	Pemilu 2009	Pemilu 2014	Pemilu 2019	Pemilu 2024
1	PAN	6,44	6,03	7,57	6,84	7,24

2	PKB	10,56	4,95	9,04	9,69	10,62
3	PKS	7,34	7,89	6,77	8,21	8,42

PPP, PBB dan Partai Gelora menjadi partai Islam yang tidak lolos *electoral threshold* pada pemilu 2024. Namun, Secara historis, PPP menjadi partai politik Islam yang tidak lolos ET sejak pemilu 2024, dan PBB tidak lolos ET hampir pada setiap pemilu, sedangkan Partai Gelora masih merupakan partai baru yang berkompetisi di pemilu 2024. Penelitian ini mencoba menggambarkan bagaimana dinamika politik partai Islam yang terbelah menjadi partai oposisi dan partai pemerintah pada pemerintahan Jokowi-Maruf, memetakan peluang dan tantangan Partai Islam pada pemilu 2024 serta transformasi dan strategi “barunya” di tengah dinamika politik Indonesia dan politik global yang mengalami pasang surut pasca pandemi covid-19 dan berada dalam ancaman krisis multidimensional.

Tinjauan Pustaka

Penggunaan Partai politik Islam atau biasa disebut dengan Partai Islam memiliki dua konotasi, pertama sebagai Ideologi organisasi partai politik yang menjadikan Islam sebagai orientasi dan tujuannya. Pada Konteks ini partai Islam di Indonesia dapat merujuk pada Masyumi, Partai NU, PSII, Parmusi, PPP, PBB dan PKS. Kedua, dengan mengutip pendapat Von der Mehden (2008), partai Islam dipahami sebagai partai politik yang memiliki basis sosio-kultural, dimana Islam tidak dipahami sebagai sebuah basis ideologi namun lebih pada basis sosio-kultural kelompok masyarakat yang diwakilinya (Alhamdi 2013). Partai Islam terbagi menjadi tiga kelompok penting yaitu (1) Partai Islam yang berasas Islam, (2) Partai Islam yang berasaskan Islam dan Pancasila dan (3) Partai Islam yang berazaskan Pancasila tetapi berbasis masa mayoritas di kalangan muslim (Romli 2004). Pandangan ini senada dengan pendefinisian Azra yang membagi partai Islam kedalam 3 konsep utama, yaitu partai Islam dengan Islam sebagai dasar organisasi partai, Partai Islam dengan Islam sebagai simbol yang sangat erat dan mampu mengidentifikasikan dirinya dengan Islam karena partai ini memadukan Islam dengan isme lainnya, seperti simbol bulan sabit dan Kabah, serta partai islam berbasis massa Islam, Partai ini tidak menggunakan simbolisasi Islam dan penggunaan azas Islam namun keberadaannya

tidak dapat dipisahkan dari komunitas muslim di Indonesia seperti NU dan Muhammadiyah (Alhamdi 2013).

Vali Nasr membagi partai-partai Islam kepada dua jenis, yakni : partai-partai yang berorientasi Islam (Muslim demokrat) dan partai-partai Islam (Nasr 2005). Tidak seperti kelompok Islamis yang bertujuan untuk menerapkan syariat dan menghidupkan kembali kekhalifahan, Muslim demokrat memandang kehidupan politik dari kacamata pragmatis dan menolak, atau setidaknya mengurangi, klaim klasik kaum Islamis yang mengatakan bahwa agama Islam mewajibkan (umatnya) untuk membangun negara syari'at. Tujuan utama mereka lebih bersifat keduniawian yakni menyusun platform elektoral yang dapat dijalankan serta membentuk koalisi pemerintahan yang stabil untuk melayani kepentingan individu dan masyarakat – Muslim atau nonmuslim- dalam suatu arena yang demokratis, sedangkan Ridho Al-Hamdi membagi tipologi partai politik Islam di Indonesia pada tiga kelompok penting (Alhamdi 2013) dan memberikan gambaran umumnya pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Tipologi Partai-partai Islam di Indonesia

KARAKTERISTIK		TIPOLOGI PARTAI		
		TRADISIONALIS	MODERNIS	ISLAMIS
Asas		Pancasila/Islam	Pancasila/Islam	Islam
Interpretasi Islam		Tergantung Kiyai	Substantif	Formal-tekstual
Negara Islam		Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju
Basis Sosial		NU	Muhammadiyah dan ormas modernis lainnya	NU, Gerakan Tarbiyah, Persis, Perti, dll
Afiliasi Partai	Orde Lama	Partai NU	Masyumi, AKUI	PSII, Perti, PPTI
	Orde Baru	Partai NU	Parmusi	PSII, Perti, PPP

	Orde Reformasi	PKB, PKU, SUNI, PNU, PKNU, PPNUI	PAN, PUMI, PID, PCD, PIB, PAY, PMB	PKS, PPP, PBB, PP, PUI, KAMI, PSII, PSII 1905, PPII, Partai Masyumi Baru (PMB)
--	-------------------	--	---------------------------------------	---

Sumber : Buku Partai Politik Islam yang ditulis oleh Ridho Alhamdi Tahun 2013

Cara pandang ini tentu saja masih simplisistik dan menafikan berbagai kader Muhammadiyah yang mendukung partai-partai Islamis, karena pada realitasnya ada juga kader-kader Muhammadiyah yang juga mendukung partai-partai Islamis, namun pendekatan ini dianggap peneliti mampu menggambarkan transformasi partai politik Islam kontemporer di Indonesia. Prinsip-prinsip dasar Partai Islam terdiri dari (1) Berpedoman pada nilai-nilai -nilai universal Al-Quran dan As-Sunnah, (2) Musyawarah, (3) Berlaku adil, (4) Menghargai perbedaan dan bukan perpecahan (Alhamdi 2013). Sedangkan kemunculan Partai Islam di Indonesia pasca reformasi didorong oleh beberapa faktor, yaitu *Pertama*, faktor teologis yang berasal dari keyakinan bahwa agama merupakan suatu yang *integrated* dan tidak dapat dipisahkan dengan negara. *Kedua*, faktor sosiologis yang menyatakan bahwa Islam merupakan agama mayoritas penduduk Indonesia sehingga sudah sepantasnya upaya penyaluran aspirasi politik sesuai dengan nilai-nilai Islam, *Ketiga*, faktor historis, Islam memiliki peran sejarah yang sangat besar dalam perlawanan menentang penjajahan, sehingga Partai Islam diperlukan untuk melanjutkan estafet perjuangan kemerdekaan Indonesia, *Keempat*, faktor reformasi yang melahirkan era kebebasan termasuk partai politik Islam untuk berkontestasi membangun Indonesia yang lebih Islami (Romli 2004).

Firman Noor menggambarkan berbagai perkembangan studi pada intelektual dan akademisi Indonesia yang telah mengulas partai Islam secara mendalam dari berbagai sudut pandang baik dari sudut ideologi dan misi partai-partai Islam baru, keterlibatan dan perjuangan partai-partai Islam dalam perpolitikan Indonesia, konstelasi dan pluralitas di dalam partai islam, konflik internal, pelembagaan

partai serta perbandingan partai politik Islam di Indonesia dengan perkembangan partai politik Islam di negara lainnya. Kajian-kajian lainnya juga meluas hingga pada kajian analisis kritis terhadap strategi dan masa depan partai Islam, serta berbagai kemungkinan yang muncul dari dinamika partai Islam di Indonesia (Noor 2015).

Kajian Anies Baswedan mengenai Partai Politik Islam pasca pemilu 1999 dengan judul *“Political Islam In Indonesia : Present and Future Trajectory”* memperlihatkan temuan yang menarik tentang perkembangan Islam Politik di Indonesia pasca reformasi. Menurutnya, muslim Indonesia sangat heterogen, muslim Indonesia tidak memiliki konsensus bagaimana aspirasi dan agendanya diperjuangkan dalam sebuah sistem politik sehingga langkah-langkahnya cenderung partikular dalam mendukung kemajuan masyarakat muslim di Indonesia. Pada perkembangannya Politik muslim Indonesia menjadi semakin pragmatis dan direpresentasikan oleh berbagai partai politik Islam dalam mengakomodasi agenda utamanya yaitu 1) Konstitusi yang berbasis syariah, 2) Nilai moral yang Islami dalam kehidupan bernegara dan 3) Membangun kehidupan bermasyarakat. Menurutnya perolehan suara partai politik “yang memiliki kedekatan dengan Islam” pada pemilu 1999 dengan jumlah suara 56% dapat dikaitkan dengan peroleh suara partai Islam pada pemilu 1955 yang memperoleh suara 44%, Partai Islam pada pemilu 1955 telah bertransformasi menjadi parta-partai utama yang dekat dengan Islam pada pemilu 1999. Keadaan ini dipengaruhi oleh empat perubahan lingkungan politik yaitu (1) perhatian Politik yang paling besar, (2) dampak dari pemilu yang terpisah-pisah, (3) desentralisasi, dan (4) kesepakatan masyarakat muslim terhadap ide pemerintahan dan Syariah Islam. Anies Baswedan juga membandingkan ketujuh partai tersebut melalui basis partai, ketergantungan pada pemimpin partai politik, konflik internal, originalitas kekuatan politik, afiliasinya terhadap ormas Islam utama, penekanan pada aktivitas partai politik, kedekatan partai politik dengan anggota partai, dan advokasinya terhadap adopsi syariah ke dalam konstitusi. Pada umumnya partai-partai tersebut sudah tidak lagi memperjuangkan adopsi syariah dalam konstitusi dan lebih mengutamakan kebijakan-kebijakan politik yang Islami (Rasyid Baswedan 2004).

Kajian lainnya yang dilakukan oleh Ahmad Fuad Fanani mengenai *Dilema Partai Politik Islam: Terpuruk Dalam Kegagalan atau Menjawab Tantangan*. Kajian ini memperlihatkan jawaban

terhadap beberapa pertanyaan penting tentang bagaimana kondisi Partai Islam menjelang pemilu 2014, apa saja problem yang dihadapi oleh Partai Islam, dan langkah strategi apa yang harus dilakukan agar Partai Islam tidak terpuruk. Menurut kajian ini, Penduduk Indonesia adalah mayoritas muslim yang memiliki peran strategis dan signifikan dalam perubahan sosial, politik, budaya dan keagamaan sehingga berbagai partai politik berlomba-lomba untuk mendekati dan meraih dukungannya. Selain itu, Umat Islam Indonesia tidak bersifat homogen namun bersifat heterogen sehingga tidak mudah dilihat dalam satu pola sejenis, keadaan ini mendorong berbagai performa Partai Islam di era reformasi yang tidak berkorelasi positif dengan perilaku pemilih di Indonesia, partai Islam tidak terlalu diminati masyarakat Indonesia, kemenangan Gus Dur pada tahun 1999 adalah kemenangan koalisi dan pilihan alternatif dari berbagai polarisasi tokoh nasionalis. Partai Islam juga memiliki problem dan tantangan yang dialaminya sejak reformasi, *pertama*, meskipun Partai Islam masuk dalam kekuasaan namun keberadaannya di pemerintahan tidak banyak menimbulkan dampak pada peningkatan suara partai-partai Islam meskipun muncul asumsi bahwa masuknya partai Islam dalam kekuasaan akan dapat memperluas pengaruhnya di Indonesia. *Kedua*, Partai Islam sulit menemukan isu-isu strategis yang mereka perjuangkan di dalam pemilu, isu-isu identitas dan piagam Jakarta sudah tidak lagi menemukan tempat di tengah masyarakat Indonesia, *Ketiga*, Partai Islam seringkali terjebak dalam konflik internal yang biasa terjadi pasca kongres atau muktamar. *Keempat*, Partai Islam juga terbelit berbagai kasus korupsi seperti partai-partai nasionalis lainnya saat mereka berada di dalam pemerintahan, *Kelima*, Proses kaderisasi partai Islam belum terbangun secara baik, sehingga kualitas kepemimpinannya tidak mampu mempengaruhi banyak kalangan muslim di Indonesia. *Keenam*, adanya pendirian sayap-sayap Islam dalam sayap-sayap nasionalis (Fanani 2013).

Kajian ini juga menyarankan Partai Islam untuk terus membangun optimisme melalui perumusan visi strategis tentang masa depan bangsa ke depan agar bergerak pada perjuangan isu-isu kebijakan publik yang terkait dengan kepentingan rakyat kebanyakan. Partai Islam juga perlu menguatkan basis dukungan di tingkat lokal dan akar rumput dengan membuat program yang substansial dan pro rakyat, Partai Islam juga tidak boleh hanya menjadikan paradigma kekuasaan sebagai satu-satunya tujuan dan tolak ukur keberhasilan namun sesekali berada di luar kekuasaan

menjadi oposisi untuk memperluas akar dukungan masyarakat. Partai Islam juga harus dapat memberikan jawaban dari berbagai persoalan kebangsaan di Indonesia dan menghindari kekerasan serta para politisi muslim harus dapat tampil sebagai “muslim democracy” yaitu seorang politisi Muslim yang bisa melihat politik dengan kacamata yang pragmatis untuk kepentingan stabilitas negara guna melayani kepentingan individu dan kepentingan kolektif (Fanani 2013).

Kajian Gonda Yumitro tentang politik Islam dalam dinamika demokrasi di Indonesia memperlihatkan bahwa penurunan elektabilitas partai Islam pada pemilu 2014 ditengah pemilih mayoritas muslim di Indonesia terjadi karena beberapa faktor yaitu faktor demokrasi yang menyebabkan perpecahan umat Islam di Indonesia, pemanfaatan partai islam sebagai alat kepentingan elit, kompetensi Partai Islam dalam menyelesaikan berbagai permasalahan kebangsaan seperti kemiskinan pengangguran, korupsi dan lain sebagainya, selain itu opini publik dan karakter pendidikan menjadi faktor lain yang tidak menguntungkan partai Islam (Yumitro 2014).

Analisis mendalam juga dilakukan Nurhasim dkk, menurut kajiannya Partai Islam cenderung tidak stabil dan mengalami paradoks elektoral dengan jumlah pemilih muslim di Indonesia, kajian ini dilakukan pada elektoral partai Islam di pemilu 1999-2014, namun demikian eksistensi Partai Islam tetap penting untuk menjaga pluralitas demokrasi di Indonesia. Dalam temuannya yang lain, partai Islam memiliki berbagai permasalahan internal maupun eksternal. Faktor internal itu terdiri dari (1) Organisasi dan kelembagaan partai politik, (2) Polarisasi Politik dan Kepemimpinan, (3) Identitas dan disorientasi ideologi, dan (4) kinerja elektoral Partai Islam yang kurang optimal, sedangkan faktor eksternal terdiri dari (1) Transformasi Sosio kultural, dan (2) aktor struktur politik yang berlaku di Indonesia. Sehingga menurut penelitian ini, tantangan dan peluang Partai Islam tidak bisa dibaca semata-mata sebagai kemampuan memenangkan pemilu atau meraih suara dan kursi terbanyak namun jauh lebih mendasar dari hal itu adalah bagaimana meningkatkan kualitas kehadiran dan kontribusi partai-partai Islam bagi praktik demokrasi Indonesia yang tidak sekadar lebih etis dan beradab melainkan juga lebih adil, akuntabel, dan berintegritas. Partai Islam harus bisa menjadi partner yang kritis dan korektif bagi partai-partai nasionalis atau sekuler serta mengembangkan kualitas organisasi maupun kader-kader politik bukan hanya pada penguatan politik identitas (Nurhasim 2016).

Penelitian yang lebih luas dilakukan oleh Husnul Isa Harahap mengenai Partai Politik Islam di Asia Tenggara dengan judul *Islamic Political Parties in Southeast Asia : The Origin and Political Problem*, penelitian ini menemukan dua temuan penting, yaitu pertama, terdapat enam faktor yang mempengaruhi berdirinya partai politik Islam di Asia tenggara yaitu demografi, sistem politik, ideologi politik, penularan, ekonomi politik internasional, dan persaingan politik. Sedangkan temuan yang kedua adalah terdapat empat permasalahan yang dihadapi partai Islam dalam memenangkan kontestasi pemilu di Asia Tenggara yaitu perpecahan identitas budaya lokal yang disusul dengan situasi yang kurang menguntungkan bagi partai politik Islam, ideologi politik, dan kualitas partai politik Islam itu sendiri (Harahap 2019).

Penelitian mengenai peluang partai politik Islam di Indonesia dengan pendekatan SWOT jarang dilakukan oleh peneliti partai politik Islam di Indonesia, penelitian model ini pernah dilakukan oleh Gonda Yumitro namun penelitian tersebut tidak berkaitan dengan partai politik Islam, penelitian tersebut berjudul *Peluang dan Tantangan Gerakan Revivalisme Islam di Indonesia Pasca reformasi* beberapa peluang perkembangan gerakan revivalisme Islam di Indonesia adalah faktor sejarah, akulturasi melalui lembaga pendidikan, dan islamisasi kebijakan, Sedangkan tantangannya adalah mengenai opini publik, belum optimalnya sarana dialog kebinekaan, penurunan dukungan politik, perpecahan umat Islam, profesionalisme gerakan revivalisme Islam, dan sekularisme. untuk merepon hal tersebut gerakan revivalisme mengalami pergeseran gerakan dan menyesuaikan diri dengan perkembangan politik di Indonesia (Yumitro 2018). Selain itu, kajian Partai Islam pada pemilu 2019-2024 masih sulit ditemukan, kajian ini bertujuan untuk memahami peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan Partai Islam pada pemilu 2024, sehingga penelitian ini dapat dikatakan penelitian yang baru dan belum dilakukan pada bidangnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan campuran (*mixed Methods Research*), memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan metode *squensial exploratory*. Menurut John W Creswell metode penelitian ini masih relatif baru dalam ilmu sosial humaniora, metode ini

menggabungkan informasi data terbuka (open-ended) dan informasi data tertutup (closed-ended) (J. Creswell and Creswell 2018). Pemikiran awal tentang metode penelitian campuran terletak dalam gagasan bahwa semua metode memiliki bias dan kelemahan dan pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif menetralkan kelemahan dari masing-masing bentuk data. Metode ini dilakukan dengan maksud untuk mengeksplorasi berbagai fenomena di lapangan berkaitan dengan partai Islam di Indonesia dan peluangnya pada pemilu 2024, berbagai temuan tersebut diperkuat dengan temuan-temuan kuantitatif melalui survei-survei opini publik terhadap partai Islam yang dilakukan secara nasional.

Creswell menerangkan bahwa penelitian campuran *Sequential Explanatory* merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif (J. W. Creswell 2010), sedangkan menurut pendapat Sugiono metode penelitian kombinasi (*mixed methods*) adalah suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kualitatif dan kuantitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable dan obyektif (Sugiono 2013).

Munculnya metode mixed methods ini mulanya hanya mencari usaha penggabungan antara data kualitatif dengan data kuantitatif (J. W. Creswell 2010), namun menurut Tashakkori dan Teddy dalam bukunya yang berjudul *Mixed Methodology*, kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif ini muncul setelah adanya perdebatan yang berkepanjangan antara dua paradigma yang menjadi pedoman dari peneliti, kedua paradigma tersebut adalah positivis/empiris yang menjadi dasar konseptual dari metode kuantitatif dan paradigma konstruktivis/fenomenologi yang menjadi dasar dari metode kualitatif (Teddle 2010).

Metode ini berupaya mengeksplorasi permasalahan partai Islam di Indonesia secara mendalam berbasis pada dokumen dan data-data real di lapangan, sehingga gambaran mengenai partai Islam di Indonesia dapat dipahami dengan sangat utuh dan komprehensif. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan dua fase, yaitu pengumpulan data kualitatif yang diikuti dengan pengumpulan data kuantitatif. Pengumpulan data kualitatif ini dilakukan pada dokumen-dokumen berkaitan partai Islam, pemberitaan media, buku-buku, jurnal serta pendapat para elit dan pengamat partai Islam

mengenai pengalaman-pengalam partai Islam pada pemilu di era reformasi sejak tahun 2004 s.d 2019. Sedangkan data lainnya dikumpulkan dengan metode survei melalui pembagian kuesioner pada berbagai segmentasi pemilih yang dilakukan tahun 2021 pada 13 Provinsi di Indonesia yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, NTT, Maluku, dan Papua.

Hasil dan Pembahasan

A. Kondisi Objektif Partai Islam sebelum pemilu 2024

Indonesia menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dengan tingkat pluralitas yang tinggi serta tingkat akseptabilitas yang kuat pada sistem politik yang demokratis (Saiful Mujani, R. William Liddle 2018), meskipun temuan beberapa indeks demokrasi di dunia masih menempatkan Indonesia pada negara dengan demokrasi yang belum mapan/cacat (*flawed democracy*), namun indeks Demokrasi tahun 2022 yang dirilis *Economist Intelligence Unit* (EIU) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa Indonesia menjadi negara demokrasi terbesar ketiga dunia yang terjauh dari rezim otoritis (Zulfikar 2024). Temuan ini berbanding terbalik dengan kondisi berbagai negara-negara maju yang cenderung mengalami stagnasi dan bahkan resesi demokrasi. Beberapa penemuan penting tentang kondisi demokrasi di Indonesia adalah temuan Adriana Elizabeth yang memberikan gambaran awal tentang bentuk demokrasi di Indonesia (Hasan 2007) seperti di bawah ini :

Tabel 4. *Assessment Of Democracy in Indonesia*

<i>Indicator/issue</i>	<i>State and market</i>	<i>Society (Muslim Communities)</i>	<i>Society (non-Muslim Communities)</i>	<i>Condition</i>	<i>Consequence</i>
<i>State-society relations</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Nationalist political parties</i> ● <i>TNI (army) & Indonesian police (Polri)</i> ● <i>Business people/conglomerates</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Islamic political parties</i> ● <i>Intellectuals</i> ● <i>Social organisations</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Non Islamic political parties</i> ● <i>Intellectuals</i> ● <i>Social organisations</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Strong & powerful state domination</i> ● <i>State-market collaboration</i> ● <i>Discrimination policy</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Exploitation & corruption</i> ● <i>Religious & communal conflicts</i>

		● <i>Religious Institutions</i>	● <i>Religious institutions</i>		
<i>Religious freedom</i>	<i>Neutral & manipulative</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Moderate : majority, modern, traditional</i> ● <i>Radical : Minority, fundamentalist, violent, terrorism</i> ● <i>Liberal : Minority, Secular</i> 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Christians, Hinduist, Buddhists, others : minority in quantity, majority in economy</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Different interpretation among muslims</i> ● <i>Harmony (tolerant & trustworthy)</i> ● <i>Disharmony (intolerant, distrustful relation between muslims & non muslims)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Conflicts (open/manifest)</i>

Note : Religious freedom as a significant element in the democratization process shows that there is disharmony, intolerance and distrust among the religious people in Indonesia

Partai Nasionalis, Partai Islam dan Partai non-Islam menjadi bagian dari demokrasi di Indonesia yang membedakannya dengan negara-negara demokrasi terbesar lainnya seperti Amerika, India, Brasil, Jepang dan Filipina. Namun pada perkembangannya terjadi transformasi demokrasi, ketiga partai tersebut telah berubah menjadi partai nasionalis dan partai Islam karena berpindahnya elit serta pemilih partai non-Islam pada partai-partai nasionalis. Pada beberapa negara demokratis, partai agama juga ditemukan berkembang dengan pola fluktuatif dan cenderung menurun, partai-partai keagamaan tidak menampilkan perkembangan yang signifikan, bahkan dari waktu ke waktu justru cenderung menurun, proses tersebut didorong oleh sekularisasi, modernisasi, demokratisasi dan liberalisasi sebagai faktor penyebabnya (Inglehart 2009). Namun demikian, dukungan terhadap otoritas-otoritas keagamaan masyarakat Muslim di Timur masih lebih kuat, sehingga kondisinya berbeda dengan masyarakat Barat dan nilai religiusitas dan budaya masih mengakar kuat dalam keseharian hidupnya. Secara struktural, partai-partai politik keagamaan tidak berbeda dengan partai-partai politik yang lain. Mereka sama-sama bertujuan untuk meraih kekuasaan, mengontrol pemerintahan, menerapkan ideologi atau program-program politik tertentu, serta memiliki struktur organisasi yang kurang lebih sama. Hal yang membedakan mereka dengan partai-partai politik yang lain adalah adanya “keyakinan

bahwa doktrin agama atau nilai-nilai keagamaan harus memandu setiap aspek kehidupan”, dan adanya “ hubungan asosiasional antara partai-partai politik itu dengan kelompok-kelompok sosial keagamaan dimana mereka menyatukan kegiatan politik dengan kehidupan sosial dan spiritual. Dilihat dari sisi jaringan afiliasi yang saling melengkapi ini, maka partai-partai keagamaan lebih mirip sebagai kelompok jemaat ketimbang partai (Rosenblum 1988).

Secara historis, gerakan modern Islam seperti Muhammadiyah, Al-khairat, Persis, Persyarikatan Ulama dan Nahdlatul Ulama lahir dari gerakan pendidikan dan sosial, namun gerakan awal politik Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari Syarikat Islam, organisasi ini kemudian berubah nama menjadi Partai Sarekat Islam (PSI) pada tahun 1921 dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), pada tahun 1930, pada saat yang sama partai Islam lainnya juga berdiri yaitu Persatuan Muslim Indonesia di daerah Sumatera namun pada tahun 1930 partai ini dilumpuhkan dan dibubarkan oleh Belanda karena kegiatannya dianggap meresahkan dan menyuarakan suara-suara perlawanan terhadap kolonialisme (Noer 1982). Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) antara 1911-1942 dengan nuansa sosialis religius yang didorong oleh HOS Tjokroaminoto, mendorong secara kuat aspirasi-aspirasi umat Islam Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaan. Latar belakang Syarikat Islam sebagai embrio PSII didorong oleh dua dorongan utama yaitu kompetisi yang meningkat dalam perdagangan batik dengan pedagang asing selain itu ada tekanan dari kalangan bangsawan terhadap pengusaha batik di Solo, Syarikat Dagang Islam yang berubah nama menjadi Sarekat Islam dimaksudkan menjadi benteng dari berbagai tekanan tersebut (Noer 1982).

Organisasi ini terus berkembang dan bertransformasi menjadi partai politik Islam yang modern, serta mendorong berbagai program penting pembangunan masyarakat pada eranya, diantaranya tuntutan berdirinya dewan-dewan daerah, perluasan hak-hak Volkstraad dengan tujuan mentransformasikannya menjadi suatu lembaga perwakilan yang sesungguhnya untuk keperluan legislatif, memperjuangkan Hak pilih untuk orang dewasa berumur 18 tahun hingga 21 tahun yang telah dapat membaca dan menulis dan mengerti secukupnya bahasa melayu, menuntut penghapusan kerja paksa, dan sistem izin untuk bepergian, menuntut penghapusan peraturan yang mendiskriminasikan penerimaan murid di sekolah-sekolah, menuntut wajib belajar sampai berumur

15 tahun, perbaikan dan pembangunan lembaga-lembaga pendidikan, pemberian beasiswa pada pemuda-pemuda Indonesia untuk belajar di luar negeri, menuntut penghapusan undang-undang dan segala macam peraturan yang menghambat tersebarnya Islam, pembayaran gaji bagi kiai dan penghulu, subsidi bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam dan pengakuan bagi hari-hari besar Islam (Noer 1982).

Partai ini menuntut adanya pemisahan kekuasaan yudikatif dan eksekutif serta hukum yang sama bagi seluruh golongan negeri, serta kemudahan bagi penduduk miskin untuk memperoleh perlindungan hukum, perbaikan dalam bidang agraria, pertanian serta penghapusan *particuliere landerijen (milik tuan tanah serta perbaikan irigasi)*. Tuntutan untuk menasionalisasi industri besi, gas serta listrik, pajak proporsional, memerangi minuman keras dan candu, perjudian dan prostitusi, pelarangan penggunaan tenaga anak-anak, menjaga kepentingan para pekerja serta penambahan poliklinik gratis (Noer 1982). Kemunculan Semaun yang memilih jalan lain dengan pandangan komunis, serta Soekarno dengan pandangan-pandangan nasionalis menjadikan *landscape* perpolitikan Indonesia pra kemerdekaan menjadi beragam, padahal keduanya merupakan murid yang dibesarkan oleh HOS Tjokroaminoto. Soekarno memunculkan pandangannya pertama kali tentang pembelahan aliran politik Indonesia pada tahun 1926 pada tiga aliran politik besar yaitu, nasionalisme, Islamisme dan Marxisme. Soekarno memberikan pesan penting tentang perlunya ketiga aliran ini untuk saling menghormati satu sama lain dan bersatu karena ketiga aliran inilah yang menghidupkan gerakan politik kebangsaan dan perlawanan terhadap penjajahan bangsa asing hingga lahirnya kemerdekaan (Soekarno 1964).

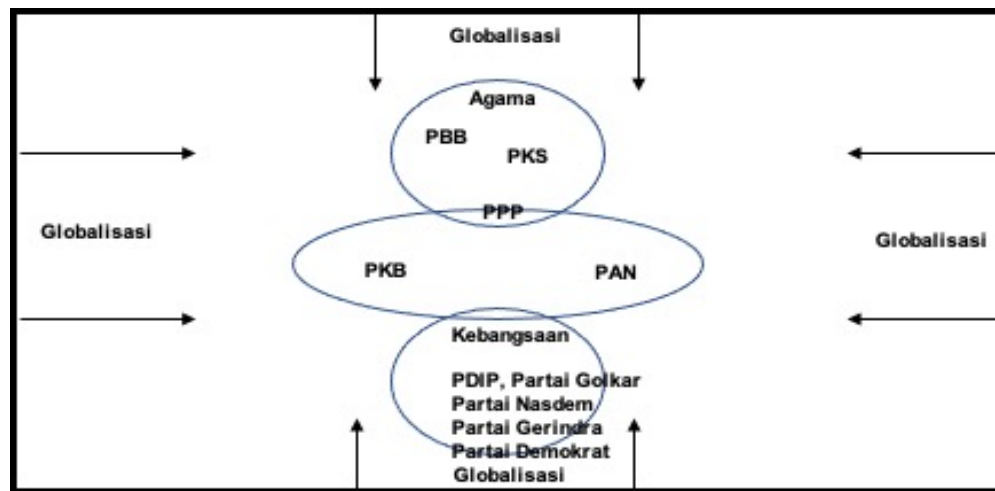
Faith dan Castle menggambarkan perkembangan ideologi politik masyarakat Indonesia pada tahun 1955 menjadi 5 kelompok besar, yaitu Nasionalisme Radikal, Tradisionalisme Jawa, Islam, Sosialisme Demokratis, dan Komunisme (Herbert Faith and Casteles 1988). Pandangan ini dijelaskan Sigit Pamungkas dengan menyebut secara detail partai-partai yang berkaitan dengan pembelahan sosial masyarakat Indonesia sebagai berikut : (1) Komunisme : PKI, (2) Sosialisme moderat : PSI, (3) Islam : Masyumi dan NU, (4) Tradisionalisme Jawa : PIR (Partai Indonesia Raya) dan Nasionalisme : PNI (Pamungkas 2011). Berbagai dinamika orde lama tidak lepas dari pembubaran partai Islam

Masyumi dan PSI bahkan PKI dilarang untuk didirikan kembali di Indonesia. Pemberlakuan asas tunggal pada era orde baru berhasil melakukan depolitisasi dan membekukan aliran politik di Indonesia, dan menyatukannya dalam 3 partai penting yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Golkar (Golongan Karya), pada masa ini partai Islam direpresentasikan oleh PPP yang merupakan fusi dari berbagai partai Islam serta ormas Islam yaitu Nahdlatul Ulama, Partai Islam Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Berbeda dengan NU, Muhammadiyah sebelumnya bergabung dengan Parmusi. Situasi ini tidak lama, kekecewaan Ormas Islam Muhammadiyah terhadap perpecahan dan kinerja Parmusi serta kooptasi pemerintah terhadap Parmusi mendorong Muhammadiyah memutuskan berbagai hubungannya dengan Partai Politik manapun dan melakukan strategi pendekatan pada berbagai partai politik nasionalis dan Islamis yang didirikan serta dekat dengan kader-kader Muhammadiyah (Sholikin 2020).

Pasca reformasi, Dhakidae mengidentifikasi adanya kemunculan kembali aliran politik Indonesia berdasarkan kelas dan aliran (Dhakidae 2003). Berdasarkan kelas, partai politik terbagi dalam dua kelompok yaitu, 1) sosialisme yang direpresentasikan oleh PRD, dan 2) pembangunanisme yang direpresentasikan oleh Partai Golkar. Sedangkan berdasarkan alirannya partai politik di Indonesia terbagi dalam dua kelompok, 1) partai politik agama yang direpresentasikan oleh PPP dan 2) dan partai politik kebangsaan yang direpresentasikan oleh PDIP. Sedangkan pada posisi pertengahan sebagai perkawinan antara jalur kelas dan aliran direpresentasikan oleh PAN, PKB dan PUDI (Dhakidae 2003). Berdasarkan analisis Indodata pada perkembangan pemilu 2004 hingga 2019 terdapat beberapa partai yang mati dan sintas (*survive*), *kematian partai politik tersebut dikarenakan 1) kegagalan melewati electoral threshold (ET) yang mencapai angka 3%-4%, 2) Menguatnya rasionalisasi pemilih sehingga pemilih lebih memilih partai politik dengan track record yang baik.* Tingkat Survival partai politik ini memotong beberapa partai politik, terutama partai politik kelas sosialis yang direpresentasikan PRD. Partai politik yang eksis sampai saat ini adalah partai politik dengan jalur aliran dimana Partai Golkar mendominasi persaingan jalur kelas dengan pembangunanisme dan merangsek masuk dalam aliran kebangsaan. Sehingga pemilihan partai politik

kontemporer terbagi kedalam tiga kelompok, yaitu, 1) aliran agama/religius, 2) aliran kebangsaan/nasionalis, dan 3) aliran nasionalis agama/nasionalis religius (D. T. . Wahidin 2020), perkembangan ini dapat terlihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 4 Pemilihan Pemilu Pada Kepartaian 2004-2009



Sumber : Buku Bela Negara dalam Berbagai Perspektif (2020)

Kondisi ini memperlihatkan bahwa Partai Islam telah mengalami pasang surut dengan berbagai dinamikanya namun suaranya memang tidak pernah melampaui partai Nasionalis (Nurhasim 2016), polarisasi Partai Islam yang menjadikannya beragam terlihat sangat kuat, polarisasinya bahkan membentuk tipologi perjuangannya yang terbentuk dari kelompok tradisional, moderat, radikal dan liberal atau pro terhadap sekularisasi. Secara formal Partai Islam yang sintas dan terus berkompetisi pada pemilu 2024 adalah PKS, PPP, PBB, PKB dan PAN ditambah dengan Partai Gelora sebagai partai baru menjelang pemilu 2024.

Penerimaan berbagai ormas Islam terhadap Pancasila juga mempengaruhi respon publik terhadap partai Islam, banyak masyarakat muslim Indonesia menganggap partai nasionalis dan Partai Islam sama-sama Islami dan melakukan pembangunan melalui upaya-upaya politik dan pembuatan kebijakan. Ormas-ormas Islam seperti Nahdlatul ulama menganggap negara Pancasila sebagai negara

Islam (Syarif 2019) dan Muhammadiyah menganggap Pancasila sebagai dasar negara yang sesuai dengan pemahaman negara Islami yaitu sebagai *darul ahdi wa syahadah* (Romadlan 2020), sejak awal tokoh-tokoh NU sudah terlibat dalam perumusan Pancasila yaitu KH. A. Wahid Hasyim dan KH. Masykur, dan menyetujui Pancasila sebagai dasar negara, kondisi ini tidak lepas dari ijtihad keagamaannya yang bersifat sunni, NU melandasi pemikirannya dengan pertimbangan fiqih dan kaidah-kaidah fiqih yang cenderung moderat (Adnan 2017). Pada Mukhtar tahun 1983 di situbondo NU semakin menegaskan bahwa Pancasila sudah final dan merupakan konsensus bersama untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan Islam sebagai aqidah (Farih 2019). Sedangkan Muhammadiyah memiliki tiga tokoh penting yang juga sama-sama merumuskan Pancasila yaitu Ki Bagus Hadikusumo, Prof. Kahar Muzakir dan Mr. Kasman Singodimejo dan menyepakati Pancasila sebagai dasar negara (Maarif 2017).

Pasca Pemilu 2014 dan 2019, Partai politik Islam di Indonesia terbagi dalam dua kelompok utama yaitu kelompok partai Islam yang pro dengan pemerintahan dan kelompok partai Islam yang kontra dengan kebijakan pemerintahan. PKS merupakan partai Islam yang konsisten menjadi partai oposisi bersama Partai Demokrat pada periode 2014-2019 hingga periode 2019-2024 (Soraya 2021), meskipun PBB sempat berseberangan dengan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla pada awal periode 2014-2019 dan mendukung pasangan Prabowo-hatta hingga mengawal suaranya ke MK, namun pada Akhir April 2018, PBB melalui Yusril Ihza Mahendra menyatakan sikapnya yang kecewa dengan Sekber yang digagas oleh PAN, PKS dan Partai Gerindra. Komunikasi politik yang tidak baik menjadi dorongan utama berhentinya PBB dari koalisi oposisi atau kontra pemerintah (Luthfia Ayu Azanella n.d.), sedangkan PAN menegaskan dirinya mendukung pemerintahan Jokowi-Maruf dan keluar dari koalisi yang kontra dan beroposisi pada pemerintah sejak tahun 2022, meskipun ketua PAN Zulkifli Hasan sudah menegaskan dirinya mendukung tanpa syarat pemerintahan Jokowi-maruf sejak tahun 2019 (Tempo.co 2021). Pada akhir 2024, kelompok partai Islam yang pro pemerintahan ditempati oleh PPP, PBB, PAN dan PKB sedangkan pada kubu oposisi hanya ditempati oleh PKS.

Pasca pandemic covid 19, berbagai partai politik terutama partai politik Islam, mulai berorientasi pada kondusifitas nasional dan mengembangkan ideologi religius nasionalis yang berorientasi pada

politik program dan kerja-kerja konstruktif yang menegaskan politik identitas, implementasi platform partai Islam sebagai partai politik yang “religius-nasionalis” dalam konteks politik nasional menjadi sangat penting untuk memperluas jangkauan pemilih partai Islam terlebih karena partai-partai nasionalis juga telah membuka diri dan berusaha meraih suara-suara pemilih muslim secara lebih luas. Berdasarkan analisis INDODATA, polarisasi ideologi partai politik Indonesia telah tersimplifikasi pada dua ideologi utama sejak pemilu 2004 yaitu ideologi agama dan kebangsaan yang termanifestasikan dalam dua kelompok utama yaitu partai politik Islam dan Partai politik nasionalis, namun pasca covid seluruh partai politik bekerja sama menyelesaikan berbagai permasalahan global yang semakin kompleks dan multidimensional (D. T. . Wahidin 2024). Ideologisasi ini mempengaruhi berbagai kebijakan-kebijakan politik yang populis dan berdimensi kepentingan nasional yang luas dan berkelanjutan, transformasi politik ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 7. Transformasi Ideologi Partai Politik Di Indonesia

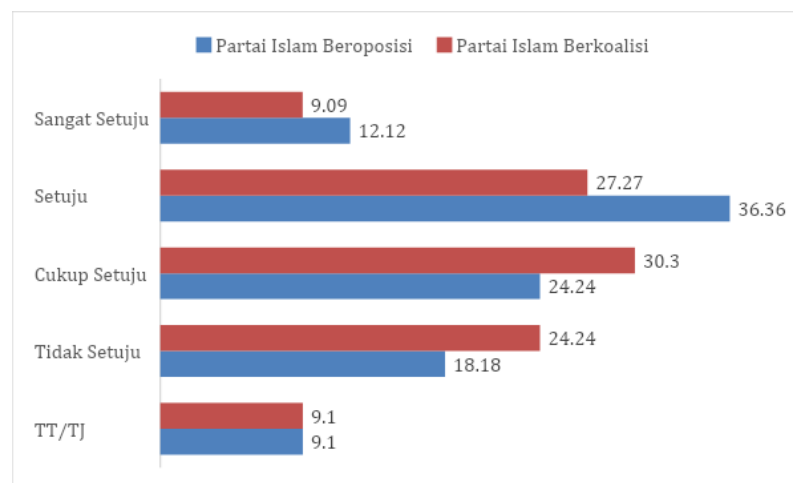


Sumber : Analisis Politik Indodata 2022

Transformasi ini mampu mengonfirmasi beberapa keraguan publik terhadap partai Islam sebagai partai politik yang dianggap tidak memiliki wawasan kebangsaan, eksklusif, intoleran, dan keras atau radikal. Pemahaman ini lebih mendorong Partai Islam pada upaya memformulasikan dan mengawal berbagai program-program yang populis dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan masyarakat.

Hasil survei yang dilakukan oleh peneliti pada tahun 2021, sebelum berlangsungnya pemilu 2024, pada 13 kota besar di Indonesia dengan 130 responden, menggambarkan respon yang positif pada sikap politik partai Islam yang berposisi dengan pemerintahan Jokowi-Maruf, sedangkan responden yang setuju dengan sikap partai Islam berkoalisi dengan pemerintahan tidak lebih banyak dari sikap yang pro dengan oposisi namun jumlahnya tidak jauh berbeda, data tersebut dapat terlihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 5. Persepsi Publik terhadap sikap Partai Islam untuk berposisi dan berkoalisi dengan pemerintahan



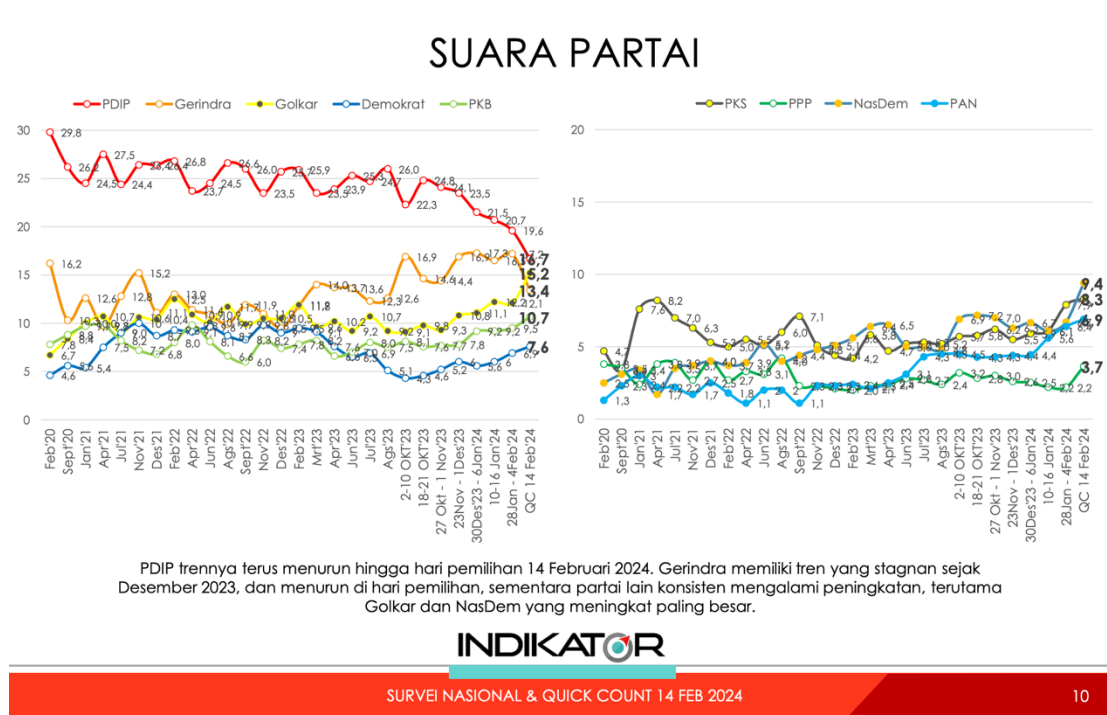
Sumber : Hasil Penelitian peneliti dengan metode purposif pada 13 kota besar Indonesia pada 130 responden tahun 2021

Hasil survei ini berkorelasi dengan perolehan suara PKS dan PKB pada pemilu 2024 yang menguat karena menyuarakan suara oposisi serta program-program perubahan dengan mendukung Anies Baswedan sebagai presiden, namun demikian perolehan suara PAN juga menguat meskipun sikapnya yang mendukung pemerintahan, pada konteks PPP suaranya cenderung terus menurun pada setiap pemilu, pada pemilu 2014 suaranya yang berjumlah 6,53% bergerak menjadi 4,6% dan 3,87% pada pemilu 2019 dan 2024. Kondisi ini memperlihatkan beberapa indikasi penting bahwa 1) pemilih partai Islam merupakan pemilih yang responsif terhadap partai pilihannya, 2) pemilih partai Islam

terpolarisasi pada dua kubu sekaligus dalam mendukung sikap politik partai politiknya antara oposisi atau mendukung kebijakan pemerintah, 3) Pada pemilu 2024, strategi oposisi dan koalisi sama-sama direspon baik oleh pemilih partai Islam, namun sikap oposisi memberikan insentif elektoral lebih pada pemilih partai Islam karena mendorong sentimen positif lebih banyak pada partai Islam yang beroposisi.

Namun demikian, persepsi pemilih terhadap sikap politik (*political attitude*) partai politik Islam merupakan salah satu aspek rasional pada perilaku pemilih Indonesia, perilaku pemilih Indonesia tidak bisa dikatakan rasional secara mutlak karena perilaku pemilih sosiologis dan psikologis juga masih kuat mempengaruhi pemilih Indonesia, bahkan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya (D. T. Wahidin 2020). Pada konteks kegagalan PPP melewati ambang batas minimal parlemen (ET) tahun 2024, posisinya tidak hanya dipengaruhi oleh sikap politiknya sebagai partai pendukung pemerintah tetapi juga karena pengaruh *endorsement* politik kandidat presiden dan wakil presiden serta berbagai pemberitaan politik dan perilaku pemilih muda yang dinamis, meskipun pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memiliki janji politik untuk melanjutkan program-program pemerintahan yang baik seperti melanjutkan pembangunan IKN, munculnya isu pemindahan dukungan Jokowi pada pasangan Prabowo-Gibran juga mengurangi perolehan suara PDIP selain perolehan suara PPP. Peningkatan suara PAN sebagai partai Islam yang mendukung pemerintahan dan mendukung pasangan kandidat presiden dan wakil presiden yang memiliki elektabilitas yang tinggi pada pemilu 2024, memperlihatkan kondisi yang berbeda dengan PPP, sehingga fenomena kenaikan PAN menjadi salah satu partai Islam yang mendapatkan limpahan insentif elektoral pada pemilu 2024. Perkembangan elektabilitas Partai Politik Islam dapat terlihat pada hasil Exit poll pemilu 2024 (Politik 2024) di bawah ini:

Gambar 6. Pergerakan Suara Partai Islam Pada Pemilu 2024



Sumber : Rilis Hasil Exit Poll Pemilu 2024 yang dilakukan oleh Indikator Politik

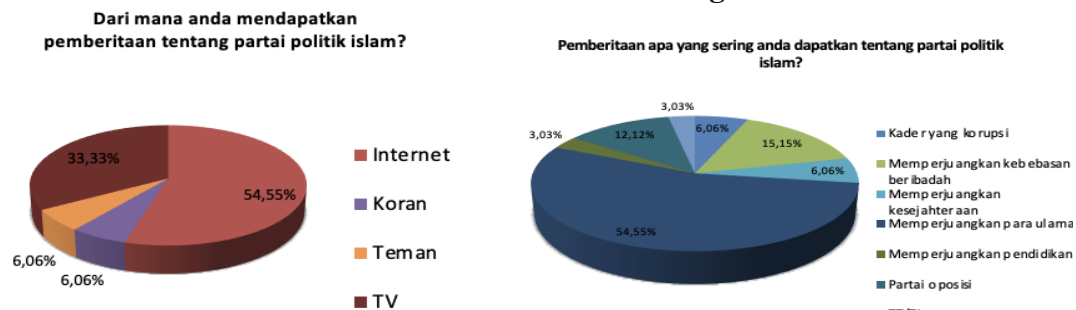
Data ini memperlihatkan bahwa semua partai Islam memiliki kecenderungan peningkatan suara yang fluktuatif (naik dan turun), namun PPP terlihat sudah ditinggalkan pemilihnya sejak akhir tahun 2022. Beberapa pemilihnya berpindah pada beberapa partai nasionalis dan partai islam, kondisi ini dipengaruhi oleh konflik internal PPP yaitu pemberhentian Suharso Monoarfa pada posisi Ketua Umum PPP, ia diberhentikan sebagai ketua umum periode 2020-2025 oleh mahkamah Partai melalui kesepakatan Majelis Syariah, Majelis Kehormatan dan Majelis Pertimbangan untuk memberhentikan Suharso sebagai ketua umum dan digantikan oleh Mardiono (Indonesia 2022).

PKS merupakan partai Islam yang konsisten menjadi partai oposisi pada periode pemerintahan Jokowi. Pada periode pertama pemerintahan Jokowi, PKS bergabung dengan KMP, kritis dan masif mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintahan serta mengampanyekan #2019GantiPresiden (Soraya 2021). Pada periode kedua pemerintahan Jokowi, PKS juga aktif mengkritik kebijakan-kebijakan

pemerintahan antara lain (1) Kemunduran demokrasi, (2) Mundurnya pemberantasan korupsi, (3) buruknya penegakan hukum, (4) Kualitas legislasi yang buruk, (5) Lambatnya recovery pemulihan kondisi masyarakat akibat covid-19, (6) Disharmoni sosial pasca pilpres yang belum membaik (PKS.id 2022).

Simpati pemilih partai Islam tidak lepas dari pengaruh pemberitaan media baik media konvensional maupun media digital. Pemilih partai Islam banyak dipengaruhi oleh media internet (54,55%), TV (33,33%), Koran (6,06%) serta kabar-kabar dari lingkungan sekitarnya. Adapun pemberitaan yang sering didapatkan oleh pemilih partai Islam adalah 1) Kepedulian partai Islam pada ulama, 2) memperjuangkan kebebasan beribadah, 3) menjadi partai oposisi, 4) kader yang korupsi, 5) memperjuangkan kesejahteraan, dan 6) memperjuangkan pendidikan. Data ini dapat terlihat pada diagram di bawah ini:

Gambar 6. Sumber Pemberitaan Tentang Partai Politik Islam



Sumber : Hasil Penelitian peneliti dengan metode purposif pada 13 kota besar di Indonesia pada 130 Responden tahun 2021

Tantangan dan Peluang Partai Islam pada pemilu 2024

Pada upaya peneliti mengelaborasi berbagai peluang dengan metode survei partai Islam menggunakan pendekatan SWOT dengan berbagai variabel kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), serta ancaman (*treath*) terlihat bahwa Partai Islam memiliki lebih banyak variabel peluang dan kekuatan dibandingkan variabel kelemahan dan ancamannya, kondisi ini

menguatkan asumsi penting bahwa eksistensi Partai Islam lebih didominasi oleh variabel-variabel bersifat positif, peluang dan kekuatan Partai Islam terdiri dari faktor mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, memiliki karakter yang toleran, moderat, demokratis, terbuka, dan religius selain itu partai Islam mampu memunculkan pemerintahan yang akomodatif, kebijakan politik yang Islami dan baik, figur kepemimpinan yang soleh (baik), citra partai politik yang baik, dan jauh dari penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Data ini dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

**Gambar 7. Persepsi Publik terhadap Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman
Partai Islam di Indonesia Tahun 2021**

No	Kekuatan	Persentase	No	Kelemahan	Persentase
1	Religius	39,39%	1	Tidak diterima pemilih yang beda Agama	51,52%
2	Kebijakan politik dan pemerintah yang Islami	27,27%	2	Eklusif	18,18%
3	Figur pemimpin yang saleh	15,15%	3	Konflik internal	12,12%
4	Citra partai yang positif dan peduli pada masyarakat	6,06%	4	Tidak berwawasan kebangsaan yang luas	9,09%
5	Jauh dari penyalahgunaan kekuasaan	6,06%	5	TT/TJ	9,09%
6	Tidak korupsi	3,03%			
7	TT/TJ	3,03%			
No	Peluang	Persentase	No	Ancaman	Persentase

1	Pemilih umat Islam yang jumlahnya mayoritas	60,61%	1	Kelompok radikal dan teroris yang memperburuk citra partai Islam	54,55%
2	Masyarakat Indonesia yang toleran	21,21%	2	Dianggap tidak toleran	18,18%
3	Pemahaman muslim yang moderat	6,06%	3	Kekhawatiran akan merubah dasar negara	12,12%
4	Pemilu jurdil dan demokratis	6,06%	4	Disintegrasi bangsa	3,03%
5	Pemerintah yang terbuka dan akomodatif	3,03%	5	TT/TJ	12,09%
6	TT/TJ	3,03%			

Sumber : Penelitian penulis pada berbagai wilayah di Indonesia tahun 2021

Variabel kelemahan dan ancaman yang dihadapi partai Islam bukan merupakan variabel-variabel yang biasa, variabel kelemahan dan ancaman tersebut dapat berpengaruh secara kompleks pada nilai-nilai kehidupan berbangsa yang plural jika tidak dapat dikelola dengan baik seperti kerukunan, persatuan, dan keamanan. Manajemen kelemahan dan ancaman untuk mencegah berbagai kemungkinan-kemungkinan terburuk yang dapat memperburuk citra partai politik Islam perlu dioptimalisasi partai Islam.

Beberapa temuan penting seperti tidak diterimanya partai Islam oleh pemilih yang berbeda agama, eksklusivitas dan tidak berwawasan kebangsaan yang luas menjadikan kelemahan partai Islam yang perlu diantisipasi dan dikelola melalui perbaikan platform, kebijakan partai dan pola kaderisasi serta optimalisasi sikap-sikap politiknya di parlemen melalui kebijakan-kebijakan yang juga pro terhadap kelompok non muslim atau tidak menyinggung keberagaman, serta menjadi lebih terbuka dan berorientasi pada nilai-nilai kebangsaan dengan tidak menyinggung kembali perdebatan-

perdebatan mengenai ideologi negara. Penerimaan pada Pancasila sebagai ideologi yang islami akan menghilangkan kecurigaan publik Pada partai Islam, sedangkan konflik internal menjadi permasalahan utama semua partai politik yang tidak dapat dihindari, perpecahan internal partai politik dapat dipicu oleh berbagai faktor pendorong, seperti ketidakpuasan pada kebijakan partai politik, menguatnya konflik antar faksi, dan komunikasi internal partai Islam yang terhambat oleh berbagai kepentingan yang tidak bertemu pada manajemen internal partai Islam.

Terkait ancaman kelompok radikal yang memperburuk partai Islam pada pemilu 2024 juga pernah terjadi dengan penangkapan Farid Ahmad Okbah sebagai ketua umum Partai Dakwah Republik Indonesia (PDRI) (Detik.com 2021) serta penangkapan salah satu kader Partai ummat DPW Bengkulu yang berinisial RH (Detik.com 2022), penangkapan itu menjadi perbincangan luas masyarakat Indonesia namun kondisi itu berhasil ditepis dengan sangkaan sebagai oknum dan tidak mewakili salah satu partai politik tertentu, PDRI sebagai partai baru juga batal mengikuti pemilu 2024, sedangkan ancaman-ancaman lainnya seperti anggapan intoleransi, kekhawatiran akan merubah dasar negara, dan disintegrasi bangsa merupakan kekhawatiran dalam skala makro yang perlu terus dikonfirmasi oleh partai-partai Islam secara konsisten.

Koalisi partai Islam dengan berbagai partai nasionalis dalam konteks politik nasional dan politik lokal menjadi alternatif strategi politik yang tidak bisa dihindari dan paling memungkinkan dilakukan partai Islam dalam upaya memenangkan berbagai kontestasi pemilu ditengah komposisi suara partai Islam yang tidak mampu melebihi partai nasionalis secara akumulatif, kemenangan Gus Dur pada awal pemilu 1999 yang didorong oleh koalisi Poros Tengah (Ekawati 2019) menjadi bukti ampuhnya koalisi partai Islam dan partai nasionalis dalam mendorong berbagai figur alternatif yang diusung oleh partai Islam, meskipun kepemimpinan Gus Dur tidak berlangsung lama, namun koalisi menjadi kebutuhan partai Islam yang tidak dapat dihindari. Tujuan koalisi adalah memaksimalkan kekuasaan (*Office Seeking*) (Strom 1990), namun menurut Kuskridho Ambardi koalisi tidak boleh hanya ditujukan untuk mendapatkan kekuasaan di pemerintahan, namun merupakan sarana untuk menjalankan program ideologis dalam mewujudkan program-program yang sesuai dengan ideologi partai politik (Ambardi

2009). Tentu saja tujuan partai Politik Islam secara umum adalah masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera serta aman dan nyaman (Alhamdi 2013).

Selain itu, adopsi gagasan Islam moderat, terbuka dan mengakomodir nilai-nilai kebangsaan juga menjadi sangat penting bagi Partai Islam karena mayoritas masyarakat muslim Indonesia merupakan masyarakat yang religius, moderat, toleran, demokratis, terbuka, dan tidak menyukai kekerasan. Perdebatan konstitusional yang terjadi pada era 50an harus ditinggalkan oleh partai Islam dengan menerima Pancasila sebagai ideologi yang Islami dan sesuai dengan ajaran Islam serta memiliki konsentrasi yang luas pada kebijakan yang pro dengan kesejahteraan publik sebagai perwujudan dari Islam yang *rahmatan lil alamin*. Tantangan Partai Islam menjadi semakin kompleks dengan munculnya sayap-sayap partai nasionalis yang mengakomodasi kegiatan religius seperti Baitul Muslimin yang dimiliki PDIP, Ikhwanul Muballighin yang dimiliki partai Demokrat, serta Laskar Ulama, Majelis Dakwah Islamiyah dan pengajian Al-Hidayah yang dimiliki oleh Partai Golkar, Gerakan Muslim Indonesia Raya (GEMIRA) yang dimiliki oleh Partai Gerindra. Keberadaan sayap-sayap agama yang dimiliki oleh partai nasionalis ini mampu memperkuat soliditas, citra partai politik dan menambah dukungan politik dari kelompok masyarakat Muslim di Indonesia.

Analisis Relevansi Strategi Politik Partai Islam Pada Pemilu 2024

Berbagai strategi partai Islam pada pemilu 2024 memiliki relevansi dengan upaya antisipasi dan eksplorasi berbagai perkembangan SWOT yang berasal dari persepsi masyarakat terhadap partai Islam di Indonesia, strategi-strategi yang berkembang dan diimplementasikan Partai Islam dapat terakomodasi dalam 4 pola utama yaitu (1) strategi ofensif, (2) defensif, (3) campuran serta (4) kampanye politik (Schroder 2013), strategi ofensif dibangun atas dua upaya yaitu dengan memperluas pasar melalui persaingan, dan upaya menekan/menembus pasar dengan memperbanyak pelanggan atau konstituen, sedangkan strategi defensif dilakukan dengan upaya mempertahankan pasar melalui penguatan pelanggan dan konstituen serta upaya menutup/menyerahkan pasar dengan memperkuat lingkungan sekitar atau sebaliknya, strategi ini dilakukan pada saat masa kampanye dan pemilu. Strategi campuran melalui upaya defensif pada partai oposisi dan upaya ofensif pada partai koalisi lebih banyak dilakukan

30

pada masa sebelum kampanye dan pemilu serta setelah pemilu, sedangkan kampanye politik dilakukan baik dengan kampanye positif dan negatif serta kampanye programatik dan kampanye isu-isu politik.

Strategi politik pada dasarnya merupakan strategi yang direncanakan untuk merealisasikan cita-cita politik (Schroder 2013) sedangkan perencanaan strategis merupakan upaya sistematis dan perumusan sasaran kedepan, respon-respon dan pilihan-pilihan, pemilihan optimal dan penetapan intruksi-intruksi untuk mengimplementasikannya secara rasional. namun demikian kemenangan hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan akhir dari strategi yaitu perdamaian, karena tujuan dari strategi bukan hanya sebuah kemenangan yang nampak dari permukaan namun kedamaian yang menjadi tujuan utamanya (Schroder 2013). Pertarungan politik dalam konteks ini adalah upaya memenangkan pertarungan gagasan dan kepentingan serta kekuasaan dan pengaruh untuk kebaikan dan kesejahteraan bersama. Sebuah kontestasi politik akan selalu menyisakan pendukung dan penentang sehingga konfrontasi gagasan tidak dapat dihindari, namun semuanya tetap harus dilakukan dalam koridor hukum dan nilai-nilai kebersamaan. Penjelasan relevansi dari strategi partai islam ini dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 6. Tabel Analisis Relevansi Strategi Politik Partai Islam Pada Pemilu 2024

No	Partai Politik Islam	Strategi Pemenangan Pemilu 2024	Analisis Relevansi
1	PKS	PKS mendukung pasangan Capres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan mendorong agenda perubahan dan mendorong caleg-calegnya untuk melakukan ekspansi pemilih melalui promosi	<ul style="list-style-type: none"> Menerapkan strategi kampanye Islam Moderat dan politik programatik, serta menghindari isu politik identitas dengan menggunakan SARA,

		<p>slogan “Seger 8ener” , mengkampanyekan program politik yang membangun dan memberdayakan masyarakat seperti Pangan Murah, Kerja Gampang, dan Sehat Mudah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan strategi ofensif dan campuran dengan metode oposisi pada kebijakan-kebijakan pemerintahan yang ingin dilanjutkan, dan kampanye persuasif untuk memperluas segmentasi pemilih perempuan, anak muda, serta rekrutmen tokoh-tokoh penting daerah dan nasional • Meminimalisir branding partai tertutup dan pro negara syariah tapi negara kesejahteraan • Tradisi defensive dan campuran dengan tetap dilakukan melalui proses kaderisasi yang terbuka, terstruktur dan bertahap
2	PBB	<p>PBB bersama partai Islam lainnya mendukung menjadi barisan terdepan mendukung pasangan Prabowo-Gibran dan mengkampanyekan agenda keberlanjutan, Yusril Ihza Mahendra bahkan bertugas menjadi koordinator tim hukum yang membela sengketa pemilu 2024 pasangan tersebut. Dalam konteks Pileg 2024, PBB memfokuskan pada empat faktor utama yaitu penguatan arah kemenangan yang terkoordinasi, penguatan arah komando dan instruksi kemenangan yang terpusat, strategi kemenangan lolos ET 4% dan kaderisasi, serta perluasan dukungan pada berbagai kelompok masyarakat baik profesional maupun non profesional</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkampanyekan partai Islam terbuka dengan mempublikasikan berbagai langkanya strateginya kepada publik • Mengkampanyekan politik programatik yang melekat pada program-program kemenangan presiden • Strategi ofensif dilakukan untuk memperluas segmentasi pemilih agar lolos ET 4% • Strategi defensif dilakukan melalui proses kaderisasi yang terbuka untuk mempertahankan tradisi internal partai

			<ul style="list-style-type: none"> • Strategi campuran dilakukan dengan memperkuat partai sebagai partai koalisi pemerintahan dan mendukung Prabowo-Gibran sebagai presiden dan Wakil presiden
3	PKB	<p>PKB berkoalisi dengan PKS dan Nasdem mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar melawan gagasan politik keberlanjutan. Pada pemilu legislatif, PKB melakukan program pecalegan dini untuk menseleksi dan merekrut calon-calon anggota legislatif, sebelum PKB resmi berkoalisi dengan partai pengusung Anies, PKB secara intensif mendorong kadernya untuk menjadi bagian dari pemerintahan membantu program-program pembangunan dan menyelesaikan permasalahan covid-19. Politik endorsement pada Cak imin atau Gus Imi dilakukan caleg PKB setelah PKB resmi berkoalisi mendukung pasangan AMIN. Beberapa dinamika sempat terjadi terutama antara PKB dengan pengurus PB NU dan menyatakan bahwa PKB bukan PBNU, dan bahkan pengurus Wilayah NU bersitegang dengan PBNU dan diwarnai dengan pemecatan sebagian pengurus wilayah NU Jawa Timur, sebagian pengurus PKB ada yang beralih mendukung kandidat pasangan lainnya namun strategi pencawapresan Cak imin berhasil mendorong elektabilitas partai meskipun pasangan AMIN tidak memenangkan pemilu 2024.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kampanye sebagai partai politik terbuka dan mengakomodasi dukungan kiyai-kiyai serta pengikut nahdyyin • Kampanye politik programatik dua arah dengan mendukung program-program pemerintahan dan mendukung program pasangan Amin saat pilpres 2024 da • Strategi politik ofensif dilakukan dengan membuka rekrutmen caleg PKB secara terbuka serta memperkuat pemilih PKB ke luar Jawa seperti Sulawesi dan Sumatera, dan mencalonkan Muhaimin Iskandar sebagai calon Wakil Presiden • Strategi politik defensif tetap dilakukan dengan menjaring suara-suara ahlu sunah wal jamaah dengan terus melakukan pendekatan kepada para kiyai , santri dan pada pengikut NU • Strategi politik campuran dengan kembali menjadi partai pendukung koalisi pemerintahan setelah kalah di pilpres

4	PPP	<p>Partai Persatuan Pembangunan berkoalisi dengan PDIP dan PERINDO mendukung pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo - Mahfud MD dengan ikut serta mengkampanyekan program pembangunan menuju Indonesia Unggul. Pada pileg, strategi PPP yang dikomandani oleh Sandiaga Uno berusaha merapatkan barisan partai dan mendorong kampanye penguatan ekonomi kerakyatan. PPP juga menargetkan segmentasi pemilih muda, PPP juga mengembangkan pola kerjasama antar caleg untuk meningkatkan suara serta program kerja nyata seperti harga murah, kerja mudah, percepatan pembangunan, serta program lainnya yang mencakup kesejahteraan rakyat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memunculkan kampanye politik programatik kerja nyata • Strategi ofensif pada pemilih-pemilih milenial dan mendukung pasangan kandidat presiden dan wakil presiden yang bersebrangan dengan partai-partai pemerintah yang mendukung Jokowi-Maruf • Strategi defensif dilakukan dengan melakukan konsolidasi kedalam partai dan melakukan penguatan organisasi sayap kepemudaan PPP • Strategi politik campuran dilakukan dengan mendukung pemerintahan dan masuk ke dalam koalisi KIM Plus
5	PAN	<p>Partai Amanat Nasional menjadi partai politik Islami yang mendukung pasangan Capres dan Cawapres Prabowo-Gibran dan mengkampanyekan agenda-agenda keberlanjutan. Pada Kampanye legislatif, caleg-caleg PAN mengusung platform “Bantu Rakyat” yang didukung oleh kalangan pengusaha dan artis selebritis, program ini diantaranya terdiri dari program “Pasar Murah”, kepedulian pada UMKM melalui festival musik BLIS, Waktunya SaraPAN. Kampanye ini didukung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan strategi kampanye nasionalis religius, politik programatik yang populis, serta menghindari isu-isu politik identitas • Melakukan strategi politik ofensif dengan merekrut para artis, caleg muda, pengusaha, dan aktivis perempuan serta mendorong endorsement figure presiden Jokowi dan mendukung pasangan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden

		dengan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat dan endorsment figur presiden Jokowi	<ul style="list-style-type: none"> Kampanye politik sebagai partai terbuka dengan meminimalisir branding PAN sebagai partai yang hanya dekat dengan Muhammadiyah dengan merekrut komponen Nahdhiyin dan alumni-alumni HMI, PII dan berbagai kelompok Islam lainnya Melakukan strategi politik defensif dengan memberikan ruang pada kader-kader loyal dan pendukung loyal untuk mendapatkan posisi strategis serta bantuan-bantuan politik
6	Partai Umat	Partai Umat menjadi bagian dari koalisi pendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pada Pileg 2024, Partai Umat menargetkan 11% suara dan minimal 4% suara agar dapat lolos pada pemilu 2024. Rekrutmen tokoh-tokoh yang memiliki basis kultural dan ketokohan yang kuat dilakukan untuk meraih suara pada pemilu 2024 seperti tokoh 212, tokoh nasional dan tokoh-tokoh daerah yang memiliki kapasitas votegetter yang baik.	<ul style="list-style-type: none"> Kampanye politik programatik perubahan dan menolak diskriminasi terhadap politik identitas serta kampanye digital pemikiran-pemikiran pak Amien Rais yang mengkritisi pemerintahan Jokowi-Maruf Amien. Pada konteks ini partai umat tidak terlalu memiliki relevansi dengan upaya mengantisipasi berbagai ancaman dan memanfaatkan berbagai peluang partai politik Islam Strategi ofensif dilakukan dengan merekrut tokoh-tokoh muslim 212, tokoh muslim berpengaruh dan memiliki suara di daerah, merangkul Partai Pelita beserta follower Din Samsuddin Strategi Campuran dilakukan dengan mendukung kepemimpinan Prabowo

7	Partai Gelora	<p>Partai Gelora mendukung pasangan Capres dan Cawapres Prabowo-Gibran dengan mengusung agenda keberlanjutan Indonesia Maju, dan mendorong caleg-caleg-calegnya membawa gagasan arah baru menuju super power baru, serta mengkampanyekan program-program pro rakyat seperti kuliah gratis dan makanan susu dan daging gratis bagi ibu hamil</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan strategi kampanye slam moderat, politik programatik dan visi pembangunan negara makro yang konstruktif menuju negara super power baru • Melakukan strategi ofensif dengan prioritas suara masyarakat jawa dan pemilih terdidik • Menghindari kampanye isu politik identitas yang berbasis pada politika SARA • Strategi politik Campuran dilakukan dengan menjadi bagian dari koalisi partai politik yang mendukung pemerintahan
---	----------------------	---	--

Sumber : Dikembangkan peneliti dari berbagai jurnal, wawancara dan observasi selama pemilu 2024

Analisis perbandingan diatas memberikan gambaran penting bahwa sebagian besar partai politik Islam mampu membaca berbagai peluang, ancaman, kekurangan dan kelebihan dari partai Islam di Indonesia, sehingga sebagian besar strateginya lebih banyak didominasi oleh strategi ofensif dan defensif, campuran dan kampanye politik sekaligus melalui strategi kampanye sebagai partai politik terbuka, kampanye politik programatik, strategi politik oposisi dan koalisi, perluasan pemilih muda dan penguatan kaderisasi internal serta upaya-upaya konstruktif dalam menghindari kampanye politik identitas yang berbasis SARA, namun demikian masih ada partai politik Islam yang masih mendorong politik identitas secara terbuka, namun partai politik tersebut tidak mendapatkan apresiasi positif di tengah-tengah masyarakat Indonesia karena langkah-langkah politiknya dianggap tidak relevan dengan kondisi dan ekspektasi publik dalam mempersepsikan partai politik Islam.

Kesimpulan

Peluang elektoral partai politik Islam cenderung stagnan dan selalu berada jauh dari partai nasionalis. Berbagai faktor eksternal dan internal menjadikan partai Islam sulit melampaui dominasi partai nasionalis. Namun Partai Islam memiliki modalitas kultural yang mendorong berbagai variabel peluang dan kekuatan yang lebih positif dibandingkan variabel kelemahan dan ancamannya. Identifikasi tersebut dapat dipahami secara komprehensif oleh berbagai partai Islam di Indonesia sehingga strategi-strategi politik pemenangannya pada pemilu 2024 mampu mengkombinasikan berbagai strategi defensif, ofensif, campuran dan kampanye politik sekaligus. Kondisi tersebut menjadi penting dalam upaya mendorong Partai Islam dapat terus bertahan (*survive*) melewati ambang batas pemilu (*electoral threshold*), meskipun jumlahnya terus berkurang dari setiap pemilu yang ada.

Dalam kondisi politik peripheral, Partai Islam memerlukan berbagai ijtihad-ijtihad politik yang fleksibel dan berorientasi pada integrasi kepentingan bersama sehingga berbagai permasalahan internal dan eksternal dapat diselesaikan dan peran Partai Islam dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat dapat dirasakan masyarakat secara signifikan dan merata.

Referensi

- Adnan, Muhammad. 2017. "Nahdlatul Ulama Dan Negara Bangsa." *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 2(1): 19–25. doi:10.14710/jiip.v2i1.1631.
- Alhamdi, Ridho. 2013. *Partai Politik Islam : Teori Dan Praktik Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ambardi, Kuskridho. 2009. *Mengungkap Politik Kartel. Studi Tentang Sistem Kepartaian Di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Anjar Nugroho. 2013. "Wacana Islam Dan Negara EraPra-Kemerdekaan: PergulatanIdeologis Kelompok Islam DanNasionalis Sekuler." *Afkaruna* 2: 130–47. doi:10.18196/AIIJIS.2013.
- BBC.com. 2017. "Isu SARA Meningkat Di Pilkada DKI Jakarta, Salah Siapa?" <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39372353>.
- Creswell, John, and J Creswell. 2018. "[Creswell_John_W.,_Creswell_J._David]_Research_des()-2.Pdf."
- Creswell, John W. 2010. *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Yogyakarta:

Pustaka Pelajar.

- Darajat, Zakiya. 2019. "Probematika Agama Dan Negara: Perspektif Sejarah." *Buletin Al-Turas* 25(1): 75–91. doi:10.15408/bat.v25i1.8682.
- Detik.com. 2021. "TPM: Ketum Partai Dakwah Farid Okbah Ditangkap Densus 88." <https://news.detik.com/berita/d-5813496/tpm-ketum-partai-dakwah-farid-okbah-ditangkap-densus-88>.
- Detik.com. 2022. "Dosen RH Tersangka Teroris Di Bengkulu Kader Partai Ummat." <https://news.detik.com/berita/d-5940355/dosen-rh-tersangka-teroris-di-bengkulu-kader-partai-ummat>.
- Dhakidae, Daniel. 2003. *Cendikiawan Dan Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru 00279*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Ekawati, Esty. 2019. "Peta Koalisi Partai-Partai Politik Di Indonesia Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Pasca Orde Baru." *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area* 7(2): 160. doi:10.31289/jppuma.v7i2.2680.
- Fanani, Ahmad Fuad. 2013. "Dilema Partai Politik Islam: Terpuruk Dalam Kegagalan Atau Menjawab Tantangan?" *Ma'arif* 8(2): 72–95.
- Farih, Amin. 2019. "Konsistensi Nahdlatul Ulama' Dalam Mempertahankan Pancasila Dan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Di Tengah Wacana Negara Islam." *JPW (Jurnal Politik Walisongo)* 1(1): 1. doi:10.21580/jpw.v1i1.2026.
- Harahap, Husnul Isa. 2019. "Islamic Political Parties in Southeast Asia: The Origin and Political Problems." *Humanities and Social Sciences Reviews* 7(5): 481–89. doi:10.18510/hssr.2019.7555.
- Hasan, Zoya et al. 2007. *Democracy In Muclim Society (The Asian Experience)*. New Delhi: Sage Publication.
- Herbert Faith, and Lance Casteles. 1988. *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. Jakarta: LP3ES.
- Indonesia, CNN. 2022. "Kronologi Suharso Diberhentikan Dari Ketum PPP Saat Di Luar Negeri." *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220905142311-32-843441/kronologi-suharso-diberhentikan-dari-ketum-ppp-saat-di-luar-negeri>.

- Inglehart, Pippa Norris & Ronald. 2009. *Sekularisasi Ditinjau Kembali: Agama Dan Politik Di Dunia Dewasa Ini*. Tangerang: Pustaka Alvabet.
- Luthfia Ayu Azanella, Bayu Galih Tim R. “Perjalanan Politik Yusril Dan PBB Hingga Akhirnya Dukung Jokowi-Ma’ruf.” <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/28/12360841/perjalanan-politik-yusril-dan-pbb-hingga-akhirnya-dukung-jokowi-maruf?page=all>.
- Maarif, Ahmad Syafii. 2017. *Islam Dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi Tentang Perdebatan Dalam Konstituante*. Bandung: Mizan.
- Nasr, V. 2005. “The Rise Of Muslim Democracy.” *Muslim Democracy* 16(2): 13–27.
- Noer, Deliar. 1982. *Gerakan Moderen Islam Di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.
- Noor, Firman. 2015. *Perpecahan Dan Soliditas Partai Islam Di Indonesia : Kasus PKB Dan PKS Di Dekade Awal Reformasi*. Jakarta: LIPI Press.
- Nubowo, Andar. 2015. “Islam Dan Pancasila Di Era Reformasi: Sebuah Reorientasi Aksi.” *Jurnal Keamanan Nasional* 1(1): 61–78. doi:10.31599/jkn.v1i1.13.
- Nurhasim, Muhammad dkk. 2016. *Masa Depan Partai Politik Islam Di Indonesia : Studi Tentang Volatilitas Elektoral Dan Faktor-Faktor Penyebabnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pamungkas, Sigit. 2011. *Partai Politik Teori Dan Praktik Di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism.
- PKS.id. 2022. “6 Kritik PKS Di Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.” *PKS.id*. <https://pks.id/content/6-kritik-pks-di-tiga-tahun-pemerintahan-jokowi-maruf>.
- Politik, Lembaga Survei Indikator. 2024. *Rilis Exit Poll Pemilu 2024 : Basis Demografi Dan Perilaku Pemilih*. Jakarta.
- Power, Thomas, Eve Warburton, and Demokrasi Di. 2021. *Demokrasi Di Indonesia-FINAL OFFSET PALING FINAL*. Indd. www.penerbitkpg.id.
- Rasyid Baswedan, Anies. 2004. “Political Islam in Indonesia Present and Future Trajectory.” *Asian Survey* 44(5): 669–90. <http://www.washingtoninstitute.org/watch/Policy>.
- Romadlan, Said. 2020. “Diskursus Negara Pancasila Di Kalangan Muhammadiyah.” *Jurnal Sosial Politik* 6(1): 1. doi:10.22219/sospol.v6i1.10041.

- Romli, Lili. 2004. "Partai Islam Dan Pemilihan Islam Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Politik* 1(1): 29–48.
- Rosenblum, Nancy L. 1988. "Religious Parties, Religious Political Identity and the Cold Shoulder of Liberal Democratic Thought." *Ethical Theory and Moral Practice* (1963): 23–53.
- Saiful Mujani, R. William Liddle, Kuskridho Ambardi. 2018. *Voting Behavior in Indonesia Since Democratization : Critical Democrat*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Schroder, Peter. 2013. *Strategi Politik*. Jerman: Nomos.
- Sholikin, Ahmad. 2020. "Dinamika Hubungan Muhammadiyah Dan Partai Politik Di Indonesia." *Jurnal Polinter : Kajian Politik Dan Hubungan Internasional* 5(2): 1–19. doi:10.52447/polinter.v5i2.4050.
- Soekarno. 1964. *Nasionalisme, Islamisme Dan Marxisme, Dalam Dibawah Bendera Revolusi*. Jakarta: Departemen Penerangan,.
- Soraya, Sarah. 2021. "Konsistensi Partai Keadilan Sejahtera Di Luar Pemerintahan Joko Widodo Pada Periode 2014-2019 Dan 2019-2024." *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)* 2(2): 97–105. doi:10.15408/jisi.v2i2.24955.
- Strom, Kaare. 1990. "A Behavioral Theory of Competitive Political Parties." *American Journal of Political Science* 34(2): 565. doi:10.2307/2111461.
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Syarif, Fajar. 2019. "Ijtihad Politik Nu: Negara Pancasila Adalah Negara Islam." *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan* 3(2): 56. doi:10.31958/jsk.v3i2.1625.
- Teddle, Abbas Tashakkori dan Charles. 2010. *Mixed Methodology : Mengombinasikan Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tempo.co. 2021. "Sederet Fakta Bergabungnya PAN Ke Partai Koalisi Jokowi." *tempo.co*. <https://nasional.tempo.co/read/1499194/sederet-fakta-bergabungnya-pan-ke-partai-koalisi-jokowi>.
- Wahidin, Danis T.S. 2020. "Politik Kebangsaan Ditengah Polarisasi Aliran Politik Di Indonesia." In *Bela Negara Dalam Berbagai Perspektif: Kumpulan Gagasan Warga Kampus Tentang*

Penerapan Bela Negara Di Era Digital, Depok: Rajawali Pers.

Wahidin, Danis T.S. 2024. *Analisis Politik Perkotaan Dan Pemilu: Memeangkan Kota Depok Pada Pemilu 2024*. Depok.

Wahidin, Danis TS. 2020. "Partai Politik Dan Perilaku Pemilih Di Indonesia." *Journal of Government & civil Society* 4(1): 131–44.

Yumitro, Gonda. 2014. "Partai Islam Dalam Dinamika Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan ilmu Poltik* 17(1): 35–50.

Yumitro, Gonda. 2018. "Peluang Dan Tantangan Gerakan Revivalisme Islam Di Indonesia Pasca Reformasi." *Tsaqafah* 14(246): 55–72